

KONFLIK DAN TANTANGAN BUDAYA BARU

CONFLICT AND NEW CULTURAL CHANGES

Kholis Ridho

UIN Syarif Hidayatullah

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Tangerang Selatan

e-mail: kholisridho@gmail.com

Diterima: 21 April 2013, Disetujui: 1 Juli 2013

Abstrak

Jika di era orde lama, konflik horizontal lebih dominan akibat pertentangan ideologis, sementara era Orde Baru lebih pada perebutan sumber ekonomi, maka di era reformasi sumber konflik semakin variatif dan kompleks. Kini sumber konflik tidak saja karena keduanya, tetapi dampak integrasi budaya asing dengan kebudayaan sendiri telah menjadi sumber konflik yang melengkapi dinamika kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Tidak semua anggota masyarakat mampu melakukan adopsi dan adaptasi dengan gencarnya kebudayaan baru yang masuk ke Indonesia. Pergesekan antara mereka yang menerima dan menolak kebudayaan baru di era reformasi menjadi sumber konflik horizontal baru yang penting didiskusikan secara lebih luas.

Kata Kunci: *konflik antar budaya, budaya populer, pembangunan sosial.*

Abstract

While ideological incompatibility became the main issue to trigger some horizontal conflicts during the era of the Old Order, and economic resources drove to most conflicts in the New Order era, horizontal conflicts has now been becoming more varied and complicated in nature since the Reformation era. The sources of conflict are not only driven by ideology and economic resources, as the first two regimes displayed, but also emerging from cultural aspect especially the clash of the integration of foreign and local cultures. Given this sophisticated reality, horizontal conflict generates a more dynamic social condition in Indonesia. It is generally accepted that individuals within particular society has different attitude toward different culture, this in turn gives rise to a new feature of horizontal conflict in Indonesia especially after Reformation onwards.

Keywords: *conflict, popular culture, social development.*

PENDAHULUAN

Pemikiran Thamrin Amal Tomagola (2005)¹ tentang pentingnya pemahaman geopolitik nusantara dalam memahami konflik sosial di Indonesia menjadi pijakan pikir yang turut menginspirasi tulisan ini. Dalam pandangan Thamrin bahwasanya kondisi geografis dan sosial politik di Indonesia menjadi anatomi

utama bagi tumbuhnya benih perselisihan, konfrontasi, hingga mengakibatkan benturan fisik antar kelompok, golongan, agama, suku, dan warga masyarakat. Wawasan geopolitik dimaksud adalah struktur masyarakat dengan jumlah suku bangsa, bahasa, tradisi dan agama lokal yang demikian beragam di Indonesia meniscayakan suatu kondisi benturan

1. Thamrin Amal Tomagola, *Anatomi Konflik Komunal di Indonesia: Kasus Maluku, Poso dan Kalimantan 1998 – 2002*, Makalah disampaikan dalam “Forum Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Rekonsiliasi Antarmasyarakat Terlibat Konflik”, yang diselenggarakan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, di Wisma Syahida UIN Jakarta, 17-19 Oktober 2005.

perselisihan dalam bermasyarakat yang sulit terhindarkan². Demikian juga dengan kondisi warga masyarakat pada wilayah Indonesia yang dilalui jalur gunung berapi (*ring of .re*) --melingkar dari ujung Sumatera, Jawa, NTB hingga Sulawesi-- merupakan sumber bencana alam yang memicu bencana sosial secara lebih luas.

Kenyataan sosiologis dan geogra.s yang sedemikian kompleks bersamaan dengan sumber konôik lainnya seperti kebijakan politik dan tata ruang wilayah umumnya konôik perkotaan, persaingan sumber perekonomian yang terbatas, sejarah konôik masa lalu, serta sebab-sebab konôik lainnya semakin menguatkan pandangan tentang keniscayaan konôik di Indonesia. Karena itu pendekatan pengelolaan konôik secara *bottom up* dan peningkatan kesadaran warga masyarakat tentang wawasan geopolitik nusantara secara berkelanjutan menjadi kebijakan yang seharusnya strategis. Tidak saja diarahkan melalui pendekatan “*penyelesaian konôik*” yang sarat dengan orientasi *top down*, tetapi upaya pencegahan konúik dan pengelolaan dinamika bermasyarakat menjadi pendekatan resolusi kon¼k yang dibutuhkan dalam kurun dekade terakhir³.

Artinya, pemahaman masyarakat tentang keniscayaan kon. ik dalam pergaulan bermasyarakat adalah suatu hal yang wajar dan bukan hal tabu perlu untuk diinternalisasikan

secara arif dan tepat. Penting disadari bahwa interaksi antar golongan masyarakat senantiasa mengandung potensi kon. ik, dalam berbagai bentuknya, terutama jika kesadaran sebagai warga masyarakat masih rendah (Srijanti A. Rahman, dkk, 2008:145). Kon. ik dengan demikian menjadi tindakan yang tidak wajar adalah ketika telah mengarah pada konfrontasi sik yang merusak dan merugikan pihak lain baik secara psikologis, material dan sik⁴.

Berdasarkan telaah penulis bersama tim ketika mendampingi masyarakat terlibat kon. ik etnis dan keagamaan sejak 2003-2004 dan dilanjutkan 2009-2011 terkait resolusi kon. ik etnoteligius di 14 propinsi, tampaknya fenomena pemahaman tentang kon. ik dimaksud mengalami pergeseran dibanding budaya politik pada masa pemerintahan Orde Baru atau budaya Jawa misalnya serta budaya timur secara lebih luas, yang lebih dekat dengan pendekatan memendam perselisihan, meredam perbedaan pendapat, patuh pada pimpinan/ atasan, serta patronase. Kini tumbuh dinamika bermasyarakat yang lebih terbuka dalam pemikiran dan tradisi baru, menyukai perubahan secara cepat, tidak ketat pada tradisi lokal, dan seterusnya (Imam Syaukani, [peny.], 2010: 18-26; Rusmin Tumanggor, dkk., 2010). Perubahan sosial ini pada praktiknya berdampak pada model interaksi bermasyarakat antara kalangan yang “bertahan” pada kebiasaan dan atau tradisi lama dengan kalangan yang menginginkan model interaksi baru, atau yang sebelumnya

2. Selain secara horizontal kemajemukan Indonesia beranekaragam dilihat dari corak kesukubangsaaan dan kebudayaannya, ia juga secara vertikal beragam menurut kemajuan ekonomi, teknologi, dan organisasi sosial-politiknya (Suparlan, 1979). Sehingga tanpa disadari, masyarakat Indonesia menjadi terbelah dalam golongan dominan dan minoritas. Pembelahan golongan masyarakat berdasarkan kelompok strata ekonomi, keahlian sains-teknologi dan organisasi politik-keagamaan umumnya berpotensi menjadi benih-benih terjadinya kon. ik di tengah sukubangsa yang sangat majemuk. Yakni pada siapa atau golongan mana yang paling berhak atas sumber-sumber daya yang ada di dalam wilayah-wilayah kedaulatan Republik Indonesia (ibid).
3. Dalam Seminar Forum Kajian Antropologi Indonesia (FKAI) pada tanggal 29 November 2011 diantaranya mengemuka pemikiran tidak relevannya lagi pendekatan keamanan dalam menyelesaikan beragam kon. ik yang terjadi, perlu dibangun pendekatan dialog kultural yang mencerminkan keindonesiaan. Yakni dialog yang mampu mempertahankan identitas-identitas kultural dan posisi-posisi politik yang berlawanan sebagai sesuatu yang wajar, membuka ruang kelompok yang termarginalkan, menghormati persepsi kultural masyarakat lokal, mengarah kepada tercapainya proses rekonsiliasi dan proses permintaan maaf atas kesalahan di masa lalu, mampu merekonstruksi paradigma negara bangsa separatis yang mengusik keutuhan negara. Lihat selengkapnya dalam <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/kolom-papua/586-pendekatan-budaya-koentjaraningrat-untuk-penyelesaian-kon.ik-papua>, diakses tanggal 23 Juli 2012
4. Kon. ik dapat berupa perbedaan pendapat, peselisihan, permusuhan, dendam, pertengkaran, benturan . sik, pembakaran dan hingga kematian. Kon. ik dalam kategori ringan adalah ketika terjadi perbedaan pendapat dan pemikiran di tingkat wacana dan gagasan yang umumnya terjadi saat diskusi atau dialog. Sementara kon. ik dalam kategori sedang adalah ketika telah mengarah pada konfrontasi berupa misalnya kirim surat kaleng, pertengkaran mulut, saling mencaci, saling menghina, saling menuduh, tiah, hingga amarah dendam. Kon. ik dalam kategori puncak atau kritis adalah ketika telah mengarah pada bentrokan ¼sik seperti pembakaran, penjarahan, pembunuhan, pemerkosaan, hingga penguasaan wilayah secara paksa.

pernah mengemuka konflik antara pribumi dan pendatang. Meskipun saat ini pandangan tersebut tampaknya sudah kurang tepat.

Selain secara demografis persebaran masyarakat Indonesia baik etnis dan agama telah semakin merata ke seluruh pelosok wilayah, baik melalui program transmigrasi, atau perkawinan campur, dan melalui migrasi yang tinggi dan meluas, sehingga dirasakan cukup rumit mengklasifikasi pendatang dan pribumi, adalah juga konteks kemajuan teknologi informasi yang tumbuh cepat dan meluas. Masyarakat dihadapkan pada pilihan baru berupa pengaturan cara berinteraksi yang tidak sepenuhnya meninggalkan budaya lama, tetapi terus berupaya mengadaptasi budaya baru. Misalnya ketika pelaksanaan upacara perkawinan pada pasangan yang berlainan etnis atau ras; atau tata aturan bermasyarakat di lingkungan perumahan kompleks atau lingkungan tertentu yang terdiri beragam etnis, ras dan agama; tradisi mudik saat lebaran yang makin internasional yang sebelumnya dipandang remeh atau kampungan; perubahan cara berpakaian (fashion “muslim” dan atau “modern”); menu dan cara makan baru, seperti: KFC, McDonald, Pizza Hut, dan lainnya. Umumnya tidak semua anggota masyarakat mampu mengadopsi dan mengadaptasi semua perubahan sosial yang terjadi. Karena itu gesekan kebudayaan baik yang ditimbulkan secara alami, direkayasa atau melalui komodifikasi media informasi elektronik yang makin gencar dan meluas menjadi tantangan rumit bagi model bermasyarakat ke depan.

Tulisan ini secara singkat akan memotret tiga hal utama yang dipandang penting untuk didiskusikan bersama. Pertama, adalah bagaimana penerimaan masyarakat Indonesia terhadap perubahan sosial yang makin gencar dan mendesak tata nilai kehidupan kesehariannya yang telah mapan.

Kedua, benarkah nilai kebudayaan asing yang berintegrasi dengan kultur lokal secara sadar atau tidak sadar telah memaksa generasi bangsa menjadi apatis atas kebudayaan sendiri atau sebaliknya mengalami penolakan kritis. Ketiga, pendekatan pembangunan sosial seperti apakah yang penting dilakukan dalam merespon konflik antar budaya yang sedang melingkupi masyarakat Indonesia saat ini dan ke depan.

PEMBAHASAN

Fenomena kerendahdirian atau tepatnya ketidakberdayaan masyarakat Indonesia terhadap kebudayaannya sendiri tampaknya semakin menguat pada kurun dekade terakhir. Kerendahdirian ini kemungkinan kuat muncul akibat hubungan timbal-balik kebudayaan asing dengan kebudayaan lokal di Indonesia. Kebudayaan asing yang seringkali diposisikan superior dan kebudayaan daerah di Indonesia sebagai pihak inferior. Rendah diri ini kemungkinan disebabkan oleh sejarah masa lalu terkait penjajahan, karena pergeseran perilaku masyarakat Indonesia sendiri, atau dapat pula melalui pencitraan yang kuat dari media tentang keunggulan kebudayaan asing. Namun, dari beberapa sebab tersebut, yang terus terjadi hingga saat ini hemat penulis adalah menguatnya dominasi pencitraan media massa. Dikatakan mendasar karena pada saat penjajahan pun sudah terjadi proses pencitraan tersebut, tetapi tidak pada masa awal kemerdekaan, ketika kebudayaan Indonesia pernah mengemuka ke pentas dunia saat kepemimpinan Presiden Soekarno berkuasa.

Dimulai sejak era 90-an dan makin massif di era 2000-an, paling tidak dapat dirasakan ketika kehidupan dalam dunia sinetron atau panggung media elektronik turut memanipulasi kehidupan nyata baik secara sadar atau tidak dengan massif, yang dikenal kemudian dengan budaya populer. Bahkan tak jarang jatuh pada

pemujaan gaya hidup yang jauh dari konteks masyarakatnya sendiri. Budaya asing atau luar dimaksud adalah budaya Barat, Arab, Korea, Rusia, Jepang dan lainnya di luar kebudayaan sendiri (Indonesia) yang berakulturasi secara instan.

Diantara sorotan dampak budaya populer melalui pencitraan media adalah tentang penggambaran sosok perempuan dan laki-laki yang dipandang ideal. Tak dapat dipungkiri jika gambaran wanita cantik atau laki-laki tampan dilukiskan dengan keinginan industri (*primary diôner*) bidang kecantikan, modelling, kosmetika dan konsepsi maskulin atau feminis yang seringkali jauh dari realitas lokal atau budaya sendiri. Misalnya perempuan cantik adalah yang berkulit halus, putih, langsing, atau yang bertampang komersil seperti yang dilukiskan di iklan kosmetik, sinetron, ataupun ôlm. Atau selalu mengenakan busana religi sebagai ungkapan takwa. Sementara lelaki menarik adalah diidentiôkasikan sebagai sosok yang tampan dan kekar-berotot, atau juga ditambah lagi suka sembahyang (taat beribadah).

Demikian pula pencitraan tentang konsepsi masyarakat yang modern, beradab dan atau madani. Meskipun kita telah memiliki konsepsi kebangsaan diantaranya melalui sumpah pemuda, konsepsi tentang kenegaraan diantaranya melalui pancasila dan UUD 1945 dan tata nilai kehidupan bermasyarakat sesuai kebudayaan lokal yang begitu luhur dan beragam, tetapi dalam praktiknya kini budaya sendiri sulit diterapkan atau diaktualisasikan. Dan bahkan budaya sendiri sering dibincangkan ulang untuk tidak mengatakan telah ditinggalkan secara perlahan. Citra kehidupan

yang beradab misalnya seringkali didekatkan dengan masyarakat yang humanis, moderat, menjunjung tinggi nilai HAM, menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Atau sebaliknya pada masyarakat oposisi disesuaikan dengan tuntunan ajaran agama masing-masing. Dapat dikatakan negeri ini seolah terlahir sejak era reformasi atau bahkan terlahir setiap hari tanpa masa pertumbuhan berikutnya. Konsepsi kebangsaan, kenegaraan, norma kehidupan masa lalu dipandang bagian sejarah yang tidak relevan untuk saat ini.

Generasi masyarakat Indonesia seolah lebih mudah belajar dan menyesuaikan diri dengan kebudayaan asing dibanding belajar atau menginternalisasikan kebudayaannya sendiri. Sederhananya, masyarakat menjadi lebih konsumtif, adoptif, instan dan tanpa jati diri yang tegas. Meskipun perubahan perilaku pergaulan sebenarnya tidak ditentukan oleh pihak luar atau oleh pihak produsen (*source*), yaitu para industrialis kapitalis, tetapi ditentukan oleh dirinya sendiri (khalayak penikmat). Namun demikian, media masalah yang mampu menjangkau pelosok tanah air, yang mampu mempengaruhi "cara bergaul" para konsumen (khalayak) yang terdesak produk material dan non-material dari budaya asing atau budaya populer⁵.

Ada masyarakat yang menyikapi perubahan sosial yang terjadi kini secara realistis, kritis, atau bahkan apatis terhadap lingkungannya. Klasi. kasi masyarakat yang realistis adalah masyarakat yang menerima setiap perubahan sesuai kebutuhan zaman tanpa melupakan identitas kulturalnya. Dapat dicontohkan salah satu jargon Walikota Solo Joko Widodo tentang pembangunan kotanya

5. Konsumen, audien atau pemirsa televisi dan media elektronik lainnya dapat dibedakan dalam tiga kelompok. Yakni pemirsa pasif atau *preferred reading*, pemirsa moderat atau *negotiated reading*, dan pemirsa kritis atau *alternative/oppositional reading*. Kesemuanya adalah mereka yang mengkonsumsi hasil kebudayaan dalam media sebagai sebuah komoditas (Michael O'Shaunessy, 2005:103). Bedanya kelompok pertama, menyaksikan semua tayangan atau produksi media tanpa reserve atau menerima apa saja tayangan yang disenanginya. Kelompok kedua adalah pemirsa yang melihat setiap tayangan sesuai pilihan, kadang yang disenangi, sesuai kebutuhan, atau alasan lainnya. Sementara kelompok ketiga adalah kategori pemirsa atau konsumen yang kritis terhadap semua isi dan subtansi tayangan/media. Dari temuan O'Shaunessy umumnya media menasar kelompok pertama.

dengan slogan: *Solo Masa Lalu adalah Solo Masa Depan*. Tawaran Walikota Jokowi dan diikuti oleh masyarakatnya merupakan sikap dan perilaku yang realistis, yakni melalui alternatif pemikiran konstruktif mengikuti perubahan tanpa meninggalkan sejarah masa lalu. Berikutnya pada masyarakat dengan klasiôkasi kritis adalah masyarakat yang menolak setiap perubahan sosial dengan alternatif ekstrim, seperti gerakan Matikan TV-mu! (Sunardian Wirodono, 2005:178) atau gerakan menegakkan *Islam Kaffah* melalui *Khilafah Islamiyah*, misalnya. Efek media yang dinilai banyak memberikan realitas virtual negatif disikapi dengan menolak tayangan media elektronik dengan tujuan mencegah pertumbuhan teror TV oleh produser yang dinilai merugikan. Golongan masyarakat ketiga adalah mereka yang apatis, abai atau “tanpa konsep” dengan pelbagai perubahan sosial atau kondisi yang ada. Masyarakat kategori ini adalah masyarakat yang asyik dengan kehidupannya sendiri, yakni sesekali kritis, sesekali realitis, sesekali “bodo amat” dengan keadaan lingkungannya.

Wajar jika kemudian di era paska keruntuhan Orde Baru mengemuka golongan masyarakat yang terbelah secara tegas, seperti kapitalis, konservatif misalnya islamis, moderat, tradisionalis, sosialis, atheis, komunis dan seterusnya. Pada era ini partai Islam tidak saja Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tetapi juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan lainnya, bahkan partai agama non-Islam pun juga diakui --yang sebelumnya sulit diterima, sebut saja Partai Damai Sejahtera (PDS). Untuk Organisasi Masyarakat Islam tidak saja Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Nahdlatul Wathon, atau Persis, tetapi kini telah hadir Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela

Islam (FPI) dan seterusnya tumbuh kembang secara setara dan mendapat pengakuan secara sama. Kehadirannya, ada yang menolak secara tegas atau malu-malu hingga menerima secara total produk impor kebudayaan masyarakat luar, ada pula yang menerima kebudayaan sendiri hingga yang menolak, atau menggabungkan kebudayaan sendiri dengan kebiasaan baru. Bandingkan misalnya hubungan Islam-Kristen atau antara etnis Pribumi-Tionghoa atau NU-Muhammadiyah atau rakyat-elit dalam sejarah era orde lama, orde baru dan paska orde baru.

Artinya, meskipun mengemuka beberapa identitas kultural dan ideologis “baru” yang dijamin haknya dalam konstitusi atau setidaknya tidak ditolak secara terbuka. Tetapi dalam tataran pergaulan keseharian kehadirannya tidak sepenuhnya mudah dikompromi masyarakat. Integrasi nilai budaya baru dan lama tetap mengalami pergesekan pandangan, perseteruan, perselisihan, hingga konfrontasi atau benturan sik yang tak terelakkan. Kehadiran dinamika budaya baru sebagai konsekuensi perubahan sosial telah secara nyata menjadi sumber konflik baru yang melengkapi perwajahan Indonesia kini dan ke depan. Perusahaan ritel seperti Alfamart atau Indomart boleh saja tumbuh subur dan meluas di lingkungan kita, tetapi tentulah pedagang PKL atau pasar tradisional tak sepenuhnya diam tanpa perlawanan. Keberadaan ormas Islam seperti FPI misalnya yang menentang keras pelantikan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, bahkan dikabarkan didesak masuk Islam. Karena identitas agama yang bersangkutan sebagai Kristen Protestan dipandang tidak layak jika nantinya menjabat 12 tugas *ex ofôcio* Wagub. Seperti sebagai Ketua Badan Pembina Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur’an, Ketua Dewan Pembina Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Ketua Dewan Perimbangan Badan Amil Zakat Infaq dan

Shodaqoh, Ketua Dewan Pembina Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia, Ketua Badan Pembina Koordinasi Dakwah Islam, Ketua Dewan Penasehat Dewan Masjid Indonesia, Ketua Dewan Pembina Jakarta Islamic Center, dan Ketua Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama.

Kondisi sosial masyarakat yang sedang dan akan terus “berkompromi” dengan kebudayaan baru yang tak sepenuhnya mampu mereka kendalikan tampaknya perlu dimediasi agar tidak menimbulkan benturan kebudayaan yang berakhir chaos dan anarkis (*violent conflict*). Pemerintah, pemilik media, pemangku pranata sosial dan pengusaha perlu bersinergi mengambil peran menguatkan ketahanan sosial bermasyarakat yang kondusif bagi pembangunan nasional. Sebut saja diantaranya dengan penguatan kearifan lokal berkelanjutan, pendidikan karakter dan keteladan, perluasan *corporate social responsibility* (CSR), pengembangan perspektif perekonomian daerah dan nasional berbasis penguatan masyarakat lokal/setempat, pendidikan kewargaan bagi masyarakat terlibat konflik dan atau yang damai, penguatan dan pengembangan wawasan kebangsaan dan ke-Indonesiaan bagi generasi muda, keluarga berencana (cerdas dan berkarakter), media yang mendukung karakter kebangsaan dan ke-Indonesiaan, penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan etnis, dan seterusnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi dinamika perubahan sosial yang gencar dengan masuknya kebudayaan asing menjadi kebutuhan strategis dalam mengupayakan pembangunan sosial yang sehat dan berkarakter. Hal pokok yang menjadi kesimpulan tulisan ini; pertama pencampuran kebudayaan asing dan lokal yang makin

massif pada dekade terakhir baik melalui tatap muka langsung atau media massa. Terbukti telah mempengaruhi sistem nilai, pranata dan kelembagaan sosial, serta perilaku sosial yang semakin kompleks dan cenderung memburuk serta tidak berpola dan ngacak (“*nge-pop*”).

Kedua, karena itu penting dilakukan upaya pelestarian dan penghormatan atas kebudayaan Indonesia yang telah mapan di negeri ini. Masyarakat perlu dibekali wawasan kebangsaan dan ke-Indonesiaan secara berkelanjutan. Kehidupan bermasyarakat, hemat penulis, sepertinya tidak mungkin dibiarkan menemukan polanya sendiri dalam merespon serbuan kebudayaan baru. Kecenderungan membiarkan masyarakat mengambil pola apatis dan kritis sebagaimana dijelaskan sebelumnya tampaknya semakin menjerumuskan masyarakat kita pada problem kerendahdirian jati diri bangsa yang semakin nyata. Sebut saja konflik budaya Indonesia dengan Malaysia tentang masakan rendang, lagu daerah, kesenian reog, olahraga pencak silat dan seterusnya yang selalu memanas saat keduanya melakukan klaim kebudayaan. Konflik identitas kebangsaan di kalangan generasi muda Indonesia mengkristal dengan sebutan misalnya generasi alay, generasi NKRI bersyari’ah, generasi K’ Pop dan seterusnya.

Ketiga, penegasan dan aktualisasi karakter kebangsaan pada generasi muda Indonesia diinisiasi melalui penciptaan lingkungan sosial yang mampu memberikan contoh keteladan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial RI perlu terlibat dalam merespon pembangunan sosial melalui misalnya Gerakan Masyarakat Indonesia Berkarakter atau semacamnya guna mengembalikan ketahanan sosial masyarakat Indonesia dari ancaman konflik sosial dan disintegrasi bangsa. Indikator dukungannya adalah sekurangnya dengan menguatkan kembali

kontrol sosial antar kelompok, golongan dan komunitas masyarakat. Kebijakan pendidikan karakter yang gencar digiatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mungkin saja tidak efektif jika lingkungan sosial generasi muda tidak kondusif bagi penciptaan jati diri yang berkarakter, sebut saja misalnya masih maraknya tawuran pelajar, terorisme, korupsi, konôik pilkada, pelecehan seksual dan penjualan manusia, serta narkoba. Dengan itu Kementerian Sosial RI perlu terlibat aktif dan mengambil peran penting dalam mengupayakan sistem sosial yang sehat dan mendorong perhormatan tinggi pada martabat kehidupan bangsa. Perluasan mandat dan kewenangan Kementerian Sosial RI dalam menata kembali sistem sosial kemasyarakatan di Indonesia adalah kebijakan strategis guna mendorong pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan, keadilan, kesatuan dan persatuan seluruh warga Indonesia. Secara lebih luas, komitmen bersama untuk mendukung generasi yang berkarakter kebangsaan bukan semata menjadi tugas guru sekolah atau dosen kampus, tetapi juga tugas orang tua dan milik semua pihak yang mendaulatkan diri sebagai bagian dari bangsa dan warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bauman, Zygmunt. (1998). *Globalization: The Human Consequences*. New York: Columbia University Press.
- Fiske, John. (1989). *Understanding Popular Culture*. London: Unwin Hyman
- Idy Subandy, Ibrahim. (2007). *Budaya Populer Sebagai Komunikasi: Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Imam Syaukani. (2010). *Participatory Action Research dan Resolusi Konôik Etnoreligius: Laporan Kegiatan Kajian Penyadaran dan Pendampingan dalam Penguatan Kedamaian (Peace Making)*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI- Yayasan INCIS.
- Kasman Hi, Ahmad. & Herman, Oesman (peny.), (2000). *Damai Yang Terkoyak: Catatan Kelam Bumi Halmahera*. Ternate: diterbitkan kerjasama Kelompok Studi PODIUM, LPAM, Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara dan Madani Press.
- Koentjaraningrat, (1987). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan
- Parsudi, Suparlan. (1979). *Ethnic Groups of Indonesia. The Indonesian Quarterly vol.7, No.2*. Press.
- Harris, Peter. & Reilly, Ben. (2000). *Demokrasi dan Kon'ik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan Untuk Negoisator*. Jakarta: Institute For Democracy And Electoral Assistance.
- Pusat Penelitian Politik LIPI, (2011). *Pendekatan Budaya Koentjaraningrat untuk Penyelesaian Kon.ik Papua*. <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/kolom-papua/586-pendekatan-budaya-koentjaraningrat-untuk-penyelesaian-kon-ik-papua>.
- Rusmin Tumanggor, Imam Soeyoeti, Kholis Ridho, (2004). *Model Kedamaian Sosial di Wilayah Kon ik*. Jakarta: Lemlit UIN Jakarta Press dan Depsos RI, ISBN.

- Rusmin, Tumanggor. Ridho, Kholis. & Nurochim. (2010). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Cetakan I). Jakarta: Kencana Media Group Jakarta
- Srijanti A., Rahman. & Purwanto S.K., (2008). *Etika Berwarga Negara*. (ed.2). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sunardian Wirodono. (2005). *Matikan TV-Mu*. Yogyakarta: Resist Book
- Tomagola, Tamrin Amal. (2005, Oktober). Anatomi Konôik Komunal di Indonesia: *Kasus Maluku, Poso dan Kalimantan 1998 – 2002*. Makalah disampaikan dalam “Forum Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Rekonsiliasi Antar Masyarakat Terlibat Konôik”, yang diselenggarakan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.
- The British Council Indonesia. (2000). *Mengelola Konôik: Keterampilan dan Strategi*. Jakarta: The British Council Indonesia.